IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH

Fernanda Theodora, Febri Yuliani, dan Meyzi Heriyanto

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Implementation, Administration of Regional Property. This study aims to analyze the implementation of the administration of regional property policies within the Riau Provincial Government and analyze the obstacles in the implementation of policies for administering regional property within the Riau Provincial Government. This study uses a descriptive qualitative research method approach. Data collection techniques are interviews and observations. Key information is the goods management official at the Riau Provincial Financial and Asset Management Agency. Secondary data obtained from research documents. The results showed that the communication factor that occurred between the officials managing regional property was not good, inadequate resources both human and financial resources, disposition in the implementation of administration of regional property went poorly, and the bureaucratic structure in implementation was not effective. Obstacles in administering regional property include incomplete goods data, lack of human and financial resources, the absence of an SOP, the Property Management Officer has not carried out his authority and responsibilities properly.

Key words: implementation, administration of regional property

Abstrak: Implementasi, Penatausahaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan menganalisis hambatan dalam implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Key information yaitu pejabat pengelola barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Data sekunder diperoleh dari dokumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi yang terjadi antar pejabat pengelola barang milik daerah kurang baik, sumber daya kurang memadai baik sumber daya manusia maupun finansial, disposisi dalam implementasi penatausahaan barang milik daerah berjalan kurang baik, serta struktur birokrasi dalam implementasi belum efektif. Hambatan dalam penatausahaan barang milik daerah yaitu data barang tidak lengkap, kurangnya sumber daya manusia dan finansial, belum adanya SOP, Pejabat Pengelola Barang belum menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan baik.

Kata kunci: implementasi, penatausahaan barang milik daerah

PENDAHULUAN

Pengelolaan barang milik daerah menjadi sangat penting dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut sebagai pedoman terbentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) atau barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah antara lain yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, sesuai dengan ketentuan undang-undang, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pengelolaan barang milik daerah salah satu ruang lingkupnya adalah penatausahaan. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat menyusun neraca keuangan maka laporan barang milik daerah terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar merupakan rincian dari barang persediaan atau barang-barang yang memiliki masa manfaat kurang dari 12 bulan. Contoh barang persediaan misalnya persediaan alat tulis kantor, persediaan obat-obatan, persediaan bibit tanaman, dan lain sebagainya. Aset Tetap merupakan rincian dari barang yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset tetap ditampilkan dalam bentuk laporan berdasarkan permen- dagri 17 tahun 2007 terdiri dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A yaitu tanah, KIB B yaitu peralatan dan mesin, KIB C yaitu gedung dan bangunan, KIB D yaitu jalan, irigasi dan jaringan, KIB E yaitu aset tetap lainnya, dan KIB F yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya merupakan rincian dari barang-barang yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga, aset tak berwujud, dan lainnya.

Penatausahaan yang dilakukan dalam bentuk pencatatan/pembukuan menggunakan aplikasi SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah) mulai tahun 2012. SIMDA BMD merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP yang digunakan oleh beberapa kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi Riau. Aplikasi SIMDA BMD berdasarkan pengamatan awal penulis merupakan aplikasi penatausahaan BMD untuk memudahkan pengurus barang dalam melakukan pencatatan. Aplikasi berisikan berbagai macam kode barang untuk KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E dan KIB F.

Penatausahaan khususnya pembukuan menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pencatatan Barang Milik Daerah menjadi dasar bagi Pengguna Barang maupun Pengelola Barang untuk melakukan tindak lanjut pengelolaan atas Barang Milik Daerah yang ada. Kementerian Dalam

Negeri saat ini telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Peraturan ini nantinya akan digunakan oleh sebagai pedoman dalam membuat penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Pemerintah Provinsi Riau dalam hal penatausahaan, selain pembukuan juga saat ini sedang melakukan inventarisasi terhadap barang milik daerah. Inventarisasi dilakukan untuk melakukan pemutakhiran data dalam penertiban pencatatan atas barang milik daerah. Hal tersebut berdasarkan rekomendasi hasil audit laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau, bahwa Pemerintah Provinsi Riau harus melakukan penertiban administrasi khususnya penatausahaan.

Pertanyaan penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2014) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. George C. Edward III dalam Deddy Mulyadi (2015) mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi ti-

- dak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial.
3. Disposisi, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
 4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah meliputi Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP 07-1 mendefinisikan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset secara umum menurut Siregar (2004) adalah barang (thing) atau sesuatu

barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Mursyidi (2009) mendefinisikan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat di peroleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam implementasi kebijakan Penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku Pejabat Penatausahaan Barang Provinsi Riau dan selaku Pengguna Barang BPKAD Provinsi Riau. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Riau selaku Pengurus Barang Pengelola Provinsi Riau. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Riau. Pengurus Barang Pengguna BPKAD Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data adalah *interview* (wawan-

cara), observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, display (penyajian data), dan verifikasi (menarik kesimpulan).

HASIL

Penatausahaan Barang Milik Daerah Pembukuan

Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pemerintah Provinsi Riau melalui BPKAD untuk pembukuan sampai dengan tahun 2017 telah menggunakan penggolongan barang sesuai dengan permendagri nomor 108 tahun 2016, namun untuk pengkodean masih dilakukan kajian lebih lanjut. Pemerintah Provinsi Riau beralih ke sistem SIPKD Modul Aset yang sebelumnya menggunakan SIMDA BPKP. Hal tersebut dilakukan karena SIPKD merupakan sistem online dan dapat dilakukan pencatatan dimanapun sehingga lebih efektif dan efisien dan data lebih aman. Namun saat ini masih dilakukan kustomisasi dalam sistem serta penginputan seluruh data barang yang sebelumnya diinput di SIMDA. SIPKD saat ini sudah dilakukan integrasi dengan sistem keuangan dan memudahkan pengurus barang pengguna untuk mendapatkan dokumen kelengkapan untuk pencatatan barang.

Inventarisasi

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017

Nomor	Jenis barang	Jumlah Barang	Inventarisasi		Keterangan
			Sudah	Belum	
1	Tanah	604 persil	501	103	261 belum bersertifikat
2	Peralatan dan Mesin	167.777 unit	26.848	142.929	9.103 tidak diketahui keberadaannya, diinventarisasi oleh masing-masing OPD

Nomor	Jenis barang	Jumlah Barang	Inventarisasi		Keterangan
			Sudah	Belum	
3	Gedung dan Bangunan	1.477 unit	892	585	19 digunakan non pemerintah, 183 tidak sesuai SIP
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	75 ruas jalan	71	4	4 ruas jalan tidak bisa diinventarisasi, jaringan dan irigasi belum diinventarisasi
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Belum diinventarisasi
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	9	-	9 unit Hasil inventarisasi 6 OPD

Sumber : Data Olahan 2017

Hasil pelaksanaan inventarisasi terdapat beberapa masalah seperti untuk rumah dinas dihuni oleh PNS namun tidak mempunyai SIP (Surat Izin Penghunian), dihuni oleh Non PNS tidak mempunyai SIP, tidak sesuai dengan SIP dan lain sebagainya. Kemudian untuk tanah terdapat masalah seperti tanah belum bersertifikat, tidak memiliki pagar pengaman, tidak ada tanda batas, terdapat bangunan yang bukan milik Pemerintah Provinsi Riau dan lain sebagainya. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan untuk memperoleh data akurat di lapangan serta untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan perangkat daerah. Setelah dilakukan pemetaan maka masing-masing perangkat daerah dapat menindak lanjuti dengan berbagai bentuk pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pelaporan

Penyampaian laporan BMD setiap tahun selalu tidak tepat waktu sehingga berakibat pada penyusunan Laporan BMD Pemerintah Provinsi Riau. BPKAD memberikan sanksi kepada OPD yang tidak menyelesaikan Laporan BMD dengan cara penundaan pembayaran Uang Persediaan (UP) OPD. Dengan cara tersebut diharapkan OPD berusaha untuk menyelesaikan laporan baik semester ataupun tahunan tepat pada waktunya. Laporan yang disampaikan untuk laporan semesteran dan tahunan tahun 2017 ber-

beda dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2017, Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah menyiapkan format laporan dengan penyajian informasi yang lengkap terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada tahun sebelumnya laporan hanya dalam bentuk KIB mulai dari KIB A sampai dengan KIB F, sehingga informasi yang disajikan masih kurang.

Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Komunikasi

BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang dibawah Pengelola Barang sudah melakukan komunikasi baik formal ataupun informal kepada OPD. Pelatihan telah diberikan kepada OPD untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pejabat pengelola BMD. Kemudian bidang pengelolaan BMD BPKAD membuka ruang untuk melakukan diskusi seputar masalah pengelolaan BMD.

Sumber Daya

Jabatan Pengurus Barang merupakan jabatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dengan melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tugas yang diemban pengurus barang berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 cukup sulit untuk dilaksanakan oleh pengurus barang yang tidak muda lagi dan tidak bisa menggunakan teknologi seperti komputer. Pemerintah Provinsi riau juga tidak mempunyai klasifikasi khusus untuk PNS yang bisa diusulkan menjadi Pengurus Barang. Sumber daya manusia selain dalam menjalankan tugas rutin Pengurus Barang, juga dalam pelaksanaan inventarisasi. Inventarisasi ke lapangan tidak bisa dilakukan oleh satu orang, harus dilakukan oleh beberapa orang. Jumlah pegawai saat ini terutama di bidang penatausahaan BPKAD Provinsi Riau tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah barang yang tidak sedikit. Inventarisasi ke lapangan misalnya untuk 1 (satu) lokasi tanah dibutuhkan minimal 5 (lima) orang, dibagi tugas untuk melakukan pengukuran,

pencatatan, pemetaan lokasi, dan komunikasi dengan warga setempat.

Disposisi

Pengurus barang dalam hal ini kurang mendapat dukungan dari OPD masing-masing terutama untuk mendapatkan kelengkapan dokumen pengadaan. Pengurus barang tidak akan bisa membuat laporan barang apabila tidak memiliki kelengkapan dokumen pengadaan. Kurangnya dukungan untuk memperoleh dokumen menjadi salah satu kendala pengurus barang untuk menyelesaikan laporan tepat pada waktunya.

Struktur Birokrasi

Sejak berlakunya peraturan tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah pada tahun 2007, Pemerintah Provinsi Riau baru memiliki Peraturan Daerah tentang

pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah pada tahun 2013. Artinya selama rentang tersebut tidak ada pedoman khusus untuk pelaksanaan pengelolaan

barang milik daerah. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak proaktif terhadap pengelolaan barang milik daerah. Sehingga sampai saat ini belum ada SOP terkait pengelolaan barang milik daerah. Mekanisme pengelolaan BMD disertakan beberapa kelengkapan dokumen administrasi baik surat persetujuan maupun SK penetapan, yang semuanya ditandatangani oleh Gubernur. Dengan rentang administrasi yang cukup panjang membuat pengelolaan BMD menjadi tidak efektif. Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diharuskan ditandatangani oleh Gubernur.

PEMBAHASAN

Pemerintah Provinsi Riau masih menggunakan kodefikasi berdasarkan permendagri nomor 17 tahun 2007. Penggolongan dan kodefikasi dalam permendagri nomor 108 tahun 2016 dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak permendagri ini diundangkan. Pembukuan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau telah menyesuaikan penggolongan barang berdasarkan permendagri nomor 108 tahun 2016, untuk kodefikasi masih dalam proses penelaahan. Pen-

catatan masih dilakukan secara manual dikarenakan sedang dilakukan peralihan ke aplikasi SIPKD Modul Aset yang berbasis web dari aplikasi SIMDA BPKP yang berbasis dekstop. Sistem saat ini sudah dilakukan integrasi dengan sistem keuangan. Begitu pula inventarisasi dilakukan terhadap tanah dan gedung bangunan. Pada pelaksanaan inventarisasi terdapat kendala pada data yang tidak update, kurangnya personil, dan daerah yang sulit dijangkau. Hasil dari inventarisasi berupa laporan pelaksanaan inventarisasi dan dapat diketahui permasalahan permasalahan di lapangan.

Pelaporan BMD semesteran dan tahunan yang disampaikan dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang tidak tepat waktu. BPKAD memberi sanksi kepada OPD yang tidak menyelesaikan laporan BMD berupa penundaan pembayaran UP. BPKAD sedang mengembangkan sistem yaitu SIPKD Modul Aset untuk pelaporan.

Pejabat pengelola barang di tingkat Pengguna Barang belum memahami tentang pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan barang tidak menjadi fokus utama pada OPD, sehingga tiap OPD selalu terlambat dalam penyampaian laporan Barang Milik Daerah dan penatausahaan barang milik daerah menjadi tidak tertib, baik pembukuan, inventarisasi maupun pelaporan. Komunikasi yang terjadi antar pejabat pengelola BMD OPD kurang baik. Pejabat pengelola BMD harus diberikan pelatihan dan bimtek lebih lanjut terkait penatausahaan BMD. Dalam penatausahaan sangat dibutuhkan sumber daya baik manusia maupun finansial agar berjalan dengan baik. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial membuat penatausahaan menjadi tidak tertib. Dari sisi disposisi dalam implementasi penatausahaan BMD berjalan kurang baik. Dalam hal ini para pejabat pengelola BMD belum menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan baik. Begitu pula struktur birokrasi dalam implementasi belum efektif. Hal ini dikarenakan belum disahkannya Ranperda terkait pengelolaan barang milik daerah, sehingga berdampak kepada pergub dan SOP terkait pengelolaan terutama penatausahaan

BMD. Untuk rentang kendali juga masih panjang dikarenakan dokumen persetujuan harus ditandatangani Gubernur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa implementasi kebijakan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau belum berjalan dengan tertib, hal ini dikarenakan komunikasi yang terjadi antar pejabat pengelola BMD OPD kurang baik. sumber daya kurang memadai baik sumber daya manusia maupun finansial. disposisi dalam implementasi penatausahaan BMD berjalan kurang baik. Struktur birokrasi dalam implementasi belum efektif. Hambatan dalam penatausahaan barang milik daerah yaitu Data barang yang terdapat dalam pencatatan tidak lengkap. Kurangnya sumber daya manusia dan finansial. Belum adanya SOP tentang Pengelolaan BMD terutama tentang Penatausahaan BMD. Pejabat Pengelola Barang belum menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik)*. Bandung : Alfabeta.
- Siregar, Doli. D. 2004. *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Zarkasyi, Moh. Wahyudi. 2008. *Good Corporate Governance*. Bandung: Alfabeta.